

SEKOLAH - PENGGABUNGAN

2023

PERBUP NO. 19, BD.2023/NO. 19, 26 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, perlu mengatur ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu diganti;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021;
  - Menerangkan tentang pedoman dalam penyelenggaraan PTSP untuk menunjang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan, Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, Dan Nonperizinan, Tim Teknis PTSP, Sarana Dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Tata Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab, Pembinaan, Pengawasan, dan Pembiayaan ;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 22 September 2023;